

Toleransi dalam Masyarakat Plural Melalui Kompetensi Penyuluh Agama dalam Pelayanan Umat

Tolerance in Plural Societies Through the Competence of Religious Instructors in Service to the Ummah

Baeti Rohman

Institut PTIQ Jakarta

e-mail: baetirohman@ptiq.ac.id

Artikel diterima 19 Maret 2022, diseleksi 23 Mei 2022
dan disetujui 19 Juli 2022

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peneguhan toleransi dalam masyarakat plural melalui kompetensi penyuluh agama dalam pelayanan umat. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis dan memaparkan hasil kajian. Hasil penelitian ini adalah kompetensi Penyuluh Agama dalam melayani umat menuju kehidupan beragama yang toleran sudah memiliki persepsi dan pemahaman yang benar pada ajaran agama dan norma dalam membangun wawasan tentang pluralitas dan multi-etnis. Di dalam perjalanannya, agama-agama yang muncul dalam masyarakat multikultural kemudian dipahami oleh umatnya. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang penyuluh adalah a) kecermatan dalam menunjukkan akar permasalahan mendasar yang ada pada zaman modern, yaitu kesalahpahaman dalam memahami sifat dasar dunia dan sifat dasar manusia; b) Kecermatan dalam menunjukkan jalan keluar dari permasalahan modern. Penyuluh juga harus memahami secara rasional an sich bahkan irasional terkait apa yang dihadapi masyarakat. Dengan beberapa kompetensi ini, penyuluh dapat dimungkinkan dapat menciptakan keseimbangan dan kohesi sosial dalam masyarakat multikutral. Untuk menciptakan sikap toleransi beragama yang proporsional dalam masyarakat multikultural perlu menumbuhkan sikap netral (*epoché*) dalam melayani umat.

Kata Kunci: *Toleransi, Masyarakat Plural, Pelayanan Umat, Kompetensi, Penyuluh Agama.*

Abstract: *This study aims to determine the affirmation of tolerance in a plural society through the religious instructors competence in the service of the people. This paper uses a descriptive qualitative method in analyzing and presenting the results of the study. The research results show that the competence of religious instructors in serving the people towards a tolerant religious life already has appropriate perception and understanding of religious teachings and norms in building insight into plurality and multi-ethnicity. Therefore, the religions that emerged in a multicultural society were then understood by the people. Two competencies an extension worker should have are; a) accuracy in showing the root of the basic problems that exist in modern times, namely misunderstandings in understanding the nature of the world and human nature; b) accuracy in showing a way out of modern problems. They should also understand rationally and even irrationally regarding what the community is facing. With these competencies, it is possible for them to create balance and social cohesion in a multicultural society. To create a proportional attitude of religious tolerance in a multicultural society, it is necessary to cultivate a neutral attitude (epoché) in serving the people.*

Keywords: *Tolerance, Plural Society, Community Service, Competence, Religious Counselor.*

A. Pendahuluan

Konsep Penyuluhan Agama lebih khusus dibandingkan dengan konsep dakwah meskipun memiliki kesamaan dengan dakwah sebagaimana disampaikan Omar bahwa ada beberapa istilah yang hampir sama dengan terminologi dakwah diantaranya adalah Penerangan, pendidikan, Pengajaran dan indoktrinasi.¹

Dalam dinamikanya, penyuluhan agama dikaitkan juga dengan kegiatan layanan bimbingan atau konseling (counseling), yang bermakna sebagai suatu bentuk hubungan antara klien

dengan konselor yang memiliki pengalaman yang cukup memadai bagi pemecahan problema yang berhubungan dengan perkembangan seseorang dan tentang cara untuk memperlancar perkembangan tersebut di satu pihak dan klien dipihak lain yang sedang menghadapi kesulitan, dalam upaya mencapai solusi dan menemukan potensi dirinya ke arah perkembangan yang diinginkan.²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mubarak bahwa penyuluhan agama dapat difahami sebagai usaha memberikan bantuan yang bersifat psikologis, mental spiritual, kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam kehidupannya, dengan menggunakan metode/pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya agar mampu mengatasi masalah yang dihadapinya.³

Kegiatan penyuluhan keagamaan di Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis mengingat bahwa Indonesia adalah “negara beragama” meski bukan “negara agama”. Hal ini sesuai dengan sila pertama dari Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena itu, agama mendapatkan perhatian serius agar tercipta kedamaian dan ketentraman dan untuk menghindarkan kesalahpahaman ajaran agama, mencegah konflik internal atau antar umat beragama. Dalam rangka penguatan fungsi penyuluhan agama maka Permenpan 9/2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama hadir sebagai upaya untuk mengafirmasi peran dan kedudukan Penyuluh Agama di tengah masyarakat.⁴

Tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab penyuluh lebih diselaraskan dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, dakwah melalui media digital saat ini adalah sebuah kebutuhan yang harus diadaptasi oleh penyuluh.⁵

Sedangkan dalam kepmenkowasbangpan lama, tuisi penyuluh untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan melalui media teknologi informasi belum difasilitasi.⁶

Maka, regulasi baru yaitu permenpan 9/ 2021 ini hadir sebagai pembaharuan dengan tujuan untuk semakin menguatkan peran dan fungsi penyuluh di berbagai bidang penyuluhan, baik secara tatap muka, maupun melalui media teknologi informasi semisal, youtube, instagram, youtube dan berbagai digital platforms lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah permenpan 9/2021 akan mencetak Penyuluh Agama yang profesional dan memiliki integritas, sehingga kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat Indonesia juga semakin meningkat.

Dalam operasionalisasinya, penyuluhan agama diperlukan untuk menghadirkan perubahan nyata di masyarakat berbangsa dan bernegara. Tentu perubahan yang dimaksudkan bukan merupakan perubahan semu apalagi perubahan yang dipaksakan sehingga tidak akan berdampak dalam jangka panjang.⁷

Penyuluh Agama mendapatkan perhatian dari pemerintah mengingat fungsi dan tugasnya yang strategis dalam pembangunan bangsa. Penyuluh Agama yang keberadaannya hingga dipelosok tanah air memiliki peran penting dan secara aktif menciptakan suasana batin yang tentram dan rukun hingga akar rumput.

Pelayanan keagamaan menjadi komitmen pemerintah, negara hadir dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan dalam memeluk dan meyakini agama. Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai hak untuk menginternalisasi ajaran agama sesuai dengan keyakinannya.⁸

Tidak dapat dipungkiri ranah agama dan keagamaan seringkali mengalami friksi disebabkan perbedaan paradigma dalam melihat persoalan agama. Dinamika sosial masyarakat merupakan satu helaan nafas dengan kehidupan antar umat beragama, karena

secara inheren masyarakat Indonesia menempatkan religiusitas sebagai urusan utama sehingga menyatu dengan kehidupan sosial.⁹

Secara faktual Indonesia sebagai bangsa yang majemuk baik dari etnis, suku, bahasa dan stratifikasi sosial jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi hal yang destruktif.¹⁰

Konflik yang terjadi menunjukkan betapa pemahaman agama menjadi salah satu penyebab munculnya konflik. Agama yang idealnya menjadi perekat sosial nyatanya menjadi bagian faktor pemicu konflik. Peristiwa kerusuhan yang terkait SARA hingga kini masih menjadi Ancaman dan bahaya laten.¹¹

Atas dasar fenomena di atas, kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama menjadi pilar penting untuk memelihara harmoni kehidupan keagamaan berbasis nilai-nilai toleransi dan Penyuluh Agama sebagai “perpanjangan tangan negara” mempunyai tanggung jawab untuk mengokohkan persatuan dalam bingkai kebhinekaan. Toleransi beragama merupakan realisasi dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas.¹²

Ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk kelompok ini, menurut Joachim Wach yang juga diamini oleh Afiq Budiawan, merupakan tanggapan manusia beragama terhadap realitas mutlak yang diwujudkan dalam bentuk jalinan sosial antar umat seagama ataupun berbeda agama, guna membuktikan bahwa bagi mereka realitas mutlak merupakan elan vital keberagaman manusia dalam pergaulan sosial, dan ini terdapat dalam setiap agama, baik yang masih hidup bahkan yang sudah punah.¹³

Menurut Fritjhof Schuon,¹⁴ agama secara eksoteris terlahir di dunia ini berbeda-beda. Akan tetapi terlepas dari perbedaan yang muncul dalam agama-agama, secara esoterik agama-agama yang ada di dunia memiliki prinsip yang sama, yaitu bersumber dan tertuju pada *Supreme Being*. Cara Schuon membedakan kedua aspek

agama ini bisa diterapkan sebagai panduan bagaimana manusia yang berbeda agama bertemu satu sama lain dalam memberikan peran mereka sebagai hamba Tuhan Yang Esa di dunia ini. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial.¹⁵

Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda agama. Umat beragama musti berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat berbeda agama.

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mempromosikan toleransi dalam layanan umat oleh penyuluh agama dalam rangka membingkai kehidupan beragama yang harmonis. Kehidupan bergama dalam masyarakat plural akan terjalin harmonis bila semua umat yang berbeda agama memiliki sikap toleransi terhadap satu sama lain. Sejarah mencatat banyak pertumpahan darah atas nama agama terjadi akibat tidak adanya kesaling-pahaman antara satu sama lain, yang semestinya terwujud dalam sikap toleransi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi dan Peran Penyuluh Agama

Ada empat hal yang harus diwujudkan dalam setiap Penyuluhan pembangunan adalah menghargai sesama secara manusiawi, bebas dari tirani, dan Kehidupan masyarakat yang memiliki "sense of belonging" yang tinggi.¹⁶

Hampir serupa, Todaro menyebutkan bahwa terjadinya suatu pembangunan bila mampu memenuhi kebutuhan dasar (*life sustenance*), menjadi manusia (*self-esteem*), dan memiliki (*freedom from servitude*).¹⁷

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan selain harus mewujudkan ketersediaan fisik juga menyiapkan mental manusianya agar menjadi manusia seutuhnya.

Konsep dakwah memiliki cakupan dan dimensi yang lebih luas bila dibandingkan dengan konsep penyuluhan agama. Hal ini bisa kita telusuri mulai dari pengertian dakwah menurut bahasa yang berarti ajakan, seruan, panggilan, undangan. Maupun secara istilah, di mana dakwah menurut Hasmy adalah mengajak umat untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islam yang terlebih dahulu diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri.¹⁸

Menurut Amin, dakwah adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sistematis dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam dan menjalankannya dengan baik, dalam kehidupan individual maupun masyarakat untuk mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan menggunakan berbagai media dan metode tertentu.

Dalam konteks keagamaan, penyuluhan agama dilakukan oleh berbagai agama yang dianut di Indonesia, di mana juru penerang suatu agama memberikan penerangan kepada umatnya yang membutuhkan bimbingan hidup agar sesuai dengan tujuan dari agama yang dianutnya tersebut. Dalam agama Kristen dikenal dengan nama misi dan zending, dalam agama Buddha disebut menebar kabajikan dan lain sebagainya.¹⁹

Agama sebagai “guidance” pemeluknya untuk dapat hidup berdampingan secara mutualisme menjadi satu tarikan nafas dengan dinamika sosial kemasyarakatan dalam kehidupan antar umat beragama karena penduduk Indonesia menempatkan religiusitas sebagai urusan utama sehingga menyatu dengan kehidupan sosial.²⁰

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3:104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran/3: 104)

Menurut Quraish Shihab, ada dua hal yang perlu digarisbawahi pada ayat di atas. 1) Nilai-nilai Ilahi tidak boleh dipaksakan tetapi harus disampaikan dalam bentuk ajakan yang baik (persuasif); 2) *Al-Ma'ruf* yang sesuai dengan kesepakatan masyarakat harus diperintahkan dan sebaliknya *al-Mungkar* harus dicegah.²

Dengan konsep *al-Ma'ruf*, Al-Qur'an membuka pintu yang cukup lebar guna menampung perubahan yang positif sebagai akibat dari perkembangan masyarakat dan disinilah dibutuhkan kejelian dari seorang penyuluh. Ranah Agama dan keberagamaan menjadi instrumen penting menyangkut kemaslahatan berbangsa dan bernegara baik dibidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan ranah politik. Meskipun tidak dapat dipungkiri seringkali mengalami kontroversi karena perbedaan paradigma dalam melihat persoalan agama. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nahl/16: 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk (QS. An-Nahl/16: 125)

Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an, demikian juga cara berdakwah Nabi Muhammad saw., mengandung ketiga metode yaitu *hikmah*, *mauizhah*, dan *jidāl*. Sementara ulama membagi ketiga metode ini sesuai dengan tingkat kecerdasan sasaran dakwah. Yakni cendekiawan, yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi diajak dengan hikmah. Adapun orang awam yang belum mencapai tingkat kesempurnaan akal, tidak juga telah terjerumus dalam kebejatan moral, maka mereka disentuh dengan *mau'izhah*, sedang penganut agama lain dengan *jidāl*.²²

Tiga metode luhur dari Al-Qur'an bisa dijadikan referensi oleh para penghulu dalam aktivitasnya.

Masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma dan tradisi (kearifan lokal) disinyalir mempunyai tingkat kohesi yang tinggi. Schmitt menjelaskan kohesi sosial dipandang sebagai karakter masyarakat dalam kaitannya dengan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga asosiasi dan proses pengembangan masyarakat yang sedang berlangsung nilai-nilai bersama, tantangan bersama dan kesempatan yang setara dalam masyarakat berdasarkan sikap percaya, harapan dan interaksi timbal balik di antara masyarakat.²³

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Schmitt mengatakan kohesi sosial dipandang sebagai karakter masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antara unit-unit sosial seperti individu, kelompok, dan lembaga-lembaga asosiasi, selain itu kohesi sosial bermakna proses pengembangan masyarakat yang sedang berlangsung meliputi nilai-nilai kebersamaan, tantangan dan kesempatan yang setara dalam masyarakat berdasarkan sikap percaya, harapan di antara masyarakat.²⁴

Dalam tulisan ini akan diuraikan terlebih dahulu istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian mengenai "Toleransi Dalam Masyarakat Plural Melalui Kompetensi Penyuluh Agama

dalam Pelayanan Umat". Kompetensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Sekurangnya ada dua kelompok definisi terkait kompetensi ini. Pertama, bahwa kompetensi dibangun dari karakteristik seseorang yang dipersiapkan untuk menjalankan pekerjaan (baik tugas maupun tuntutan profesi) secara efektif, dan efisien sehingga tolok ukurnya berupa kesiapan kerja seseorang menjadi unsur yang dominan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Spencer (1993),²⁵ Imran dan Ganang (1999), serta Culp, McKee, & Nestor (2007).²⁶

Kedua, memberikan penekanan khusus bahwa kompetensi terdiri dari perpaduan berbagai unsur seperti karakteristik personal, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sangat dibutuhkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. definisi kedua ini didukung oleh beberapa ahli seperti Klausmeier & Goodwin (1966),²⁷

Stone dan Beiber (1997).²⁸ Kompetensi seseorang menurut Spencer (1993) memiliki lima karakteristik, yaitu: *Motives, Traits, Self concept, Knowledge, dan Skill*. Dari ke lima aspek tersebut, pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) sifatnya dapat dilihat (*visible*) dan mudah dikembangkan. Sedangkan konsep diri (*self concept*), watak (*traits*) dan motif (*motives*) sifatnya tidak tampak (*hidden*) dan lebih sulit untuk dikembangkan. Rutherford, menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya menggunakan satu buah kompetensi dalam satu kurun waktu, namun dapat menggunakan beragam kompetensi secara serempak yang merupakan kombinasi antara kompetensi khusus dan kompetensi kunci. Menurutnya, kompetensi terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu: *specific competencies* (kompetensi khusus) dan *key competencies* (kompetensi kunci).²⁹

Kompetensi adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.³⁰

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, sikap, keterampilan, karakteristik pribadi yang sangat penting guna mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Kompetensi adalah merupakan suatu sifat yang dihubungkan dengan kriteria efektivitas atau kinerja yang sangat baik dalam suatu pekerjaan. Spencer menambahkan bahwa kompetensi merupakan karakter dan selamanya ada pada kepribadian seseorang dan dapat diprediksi tingkah laku dan performance pada semua situasi dan job tasks. Hal ini diperkuat oleh Bergerhenegouwen dan Marshall yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan hal yang paling sulit ditiru, dikarenakan karakteristiknya yang memang berbeda dan spesifik bagi masing-masing individu.³¹

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kompetensi Penyuluh Agama merupakan cerminan kepribadian seseorang baik berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat memprediksikan kinerja atau performanya. Dengan demikian, konsep dasar kompetensi adalah kemampuan individu yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, pendidikan, bidang keahlian dan pengalaman yang dipersiapkan untuk menghadapi pekerjaannya secara efektif dan efisien.

Beberapa definisi terkait penyuluh disebutkan dalam perundang-undangan. Sebagaimana dalam peraturan menteri sosial No. 10 tahun 2014 tentang penyuluhan sosial, definisi penyuluh sosial adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Peraturan Menpan RB No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh hukum dan angka kreditnya definisi penyuluh Hukum adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Keputusan Menkowsabngpan No. 54 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Penyuluh Agama adalah Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh Agama honorer. Penyuluh Agama Fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Dari beberapa definisi tersebut nampak jelas seluruh penyuluh memiliki bidang khusus sebagai bidang garapannya, kecuali penyuluh agama yang umum. Kekhususannya hanya dibatasi pada pendekatannya saja dalam memberikan penyuluhan yaitu menggunakan bahasa agama. Ini jelas di satu sisi menguntungkan karena dapat bertugas di berbagai bidang, namun di sisi lain memberatkan akibat ketidakjelasan dari konsep maupun operasionalisasinya. Hal mana hanya bisa diatasi dengan perincian tugas selengkaplengkapannya dalam peraturan di bawahnya (misalnya peraturan menteri dan seterusnya).

Sebagai bentuk peran formal, penyuluh agama fungsional dibagi menjadi 2 (tiga) klasifikasi, yaitu: penyuluh agama terampil (pengangkatan dengan latar belakang pendidikan setara

diploma) dan penyuluh agama ahli (pengangkatan dengan latar belakang pendidikan setara sarjana). Sebagaimana keputusan Menkowsabngpan No. 54 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (pasal 6), penyuluh agama terampil terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1. Penyuluh agama pelaksana, 2. Penyuluh agama pelaksana lanjutan, dan 3. Penyuluh agama penyelia. Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa penyuluh agama ahli terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1. Penyuluh agama muda, 2. Penyuluh agama madya, dan 3. Penyuluh agama utama. Pengklasifikasian pada penyuluh agama fungsional ini ditujukan untuk memberikan arah orientasi pembinaan dan cakupan sasaran penyuluhan. Tujuan akhirnya agar dapat diwujudkan pembinaan yang holistik dan terarah kepada masyarakat. Penyuluh Agama adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan pada instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.

2. Operasional Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Dalam operasionalisasinya, penyuluhan agama diperlukan untuk menghadirkan perubahan nyata di masyarakat berbangsa dan bernegara.³²

Tentu saja perubahan yang dimaksudkan bukan merupakan perubahan semu apalagi perubahan yang dipaksakan sehingga tidak akan berdampak dalam jangka panjang. Selain itu, perlu kiranya mewujudkan mental manusia yang memanusiaikan manusia, menghargai potensi pengembangan diri, mampu bekerjasama, mandiri, dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan isemakin tumbuh subur dalam masyarakat sehingga timbul badan-badan atau organisasi pembinaan rohani baik secara struktural resmi maupun tidak

resmi yang kemudian dikenal dengan nama Binroh, Babinrohis, Bintal, Rawatan Rohani dan sebagainya.³³

Dengan demikian, semakin meluaslah kegiatan penyuluhan ini bukan hanya terhadap pembinaan umat Islam saja, namun meluas kepada umat agama yang lain. Kegiatan pembinaan rohani ini kemudian meningkat kepada pembinaan karyawan dan keluarganya yang diselenggarakan baik di kantor-kantor maupun komplek-komplek perumahan, di rumah-rumah para pejabat, di pendopo maupun tempat lainnya. Kini kegiatan penyuluhan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan pengamalan agama yang bersentuhan langsung dengan aktifitas hidup sehari-hari.³⁴

Dengan demikian, tugas penyuluh agama bukan semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan maupun penerangan berbagai program pembangunan. Tugas pokok bimbingan dan penyuluhan sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan peran penyuluh agama di masyarakat dengan kompetensi yang diharapkan sesuai kebutuhan pelayanan.

Adapun fungsi penyuluh agama di antaranya meliputi membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama, menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama, serta meningkatkan kehidupan umat beragama.³⁵

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa fungsi penyuluh agama selama ini diarahkan untuk peningkatan kualitas internal umat beragama, menjadi penyambung suara pemerintah kepada masyarakat di bidang keagamaan dan secara eksternal ikut berkontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama.³⁶

Peran penyuluh agama dalam prakteknya tidaklah bersifat tunggal yaitu hanya sebagai motivator pembangunan, namun juga meluas ke berbagai peran strategis lainnya. Pada awalnya peran penyuluh sebagai penerang bagi masyarakat, namun seiring kebutuhan, berkembang antaranya sebagai; analis, advisor, advokator, dan inovator.

Lebih kompleks lagi kontribusi pembangunan mengharuskan penyuluh agama untuk dapat berperan sebagai perencana program (dari sebagai manajer program sampai ke tahapan evaluasinya, fasilitator dan pendidik, agen perubahan, perantara, pendidik, tenaga ahli, perencana sosial, advokat dan sebagai aktivis, sebagai fasilitator, pendidik, utusan, teknikal, katalis, pemberi solusi, penolong proses dan penghubung sumberdaya, pengembangan kebutuhan sebagai agen perubahan bertugas untuk menggerakkan masyarakat melakukan perubahan dan membina hubungan dengan masyarakat sasaran binaan, serta berbagai peran lainnya baik yang berkaitan dengan administrasi, konten, program, sumber daya maupun berkaitan dengan pelayanan.³⁷

Melaksanakan penyuluhan agama merupakan salah satu tugas pokok penyuluh agama. Dalam hal ini penyuluh agama memberikan layanan penyuluhan tatap muka kepada kelompok binaannya baik kelompok binaan masyarakat umum maupun kelompok binaan khusus yang telah menjadi kelompok binaan tetapnya. Tugas yang lainnya yaitu memberikan bimbingan konsultasi baik teknis maupun non teknis kepada personal dan organisasional.

3. Agama dalam Masyarakat Multikultural

Menurut MacIver, masyarakat dibentuk oleh struktur yang tidak kelihatan dan merupakan kumpulan dari beragam hubungan manusia yang dibangun dan diubah oleh manusia itu sendiri.³⁸

Masyarakat bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam masyarakat sederhana atau primitif, manusia memiliki karakteristik yang serba homogen baik dalam budaya, agama maupun struktur sosial.³⁹

Agama yang dipahami oleh masyarakat seperti ini adalah agama yang dekat dengan simbol-simbol. Simbol-simbol ini memiliki peran dominan terhadap keberagaman mereka. Kebanyakan dari masyarakat sederhana ini berpendidikan rendah atau dalam lingkup *ordinary people*. Mereka memahami agama orang lain dengan perasaan antipati.⁴⁰

Toleransi yang dikembangkan dalam masyarakat ini tidak terjalin atau berjalan normal. Mereka mudah tersentuh atau tersinggung bila ajaran keyakinan agama mereka sepertinya dihina oleh pemeluk agama lain. Mereka merespon langsung dengan mempertahankan taruhan jiwa. Mereka memahami agama orang lain dengan sikap antipati.⁴¹

Masyarakat kompleks atau masyarakat multikultural tersusun dari keanekaragaman budaya, masyarakat dan struktur sosial. Keanekaragaman adalah fakta yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kolektif dan tidak bisa diharapkan eksistensinya atau tidak dapat ditekan tanpa tingkat kekerasan yang bisa diterima.⁴²

Terlebih lagi sejak manusia terikat dan dibentuk oleh kebudayaan, penghormatan diri mereka secara erat terikat dengan penghormatan pada kebudayaannya. Penghormatan pada kebudayaan ini menumbuhkan rasa kesetiaan, memberi rasa percaya diri dan keberanian untuk berinteraksi dengan kebudayaan lain.⁴³

Karakter interaksi antar kebudayaan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya asimilasi kebudayaan. Begitu juga dalam hal keberagaman. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat multikultural berasimilasi mengenai bagaimana

keberagaman yang baik dalam masyarakat dengan komposisi kepemeluk agama yang heterogen.⁴⁴

Hal ini menciptakan rasa toleransi dan kerjasama antar budaya-agama. Proses asimilasi ini muncul bukan hanya untuk kelompok minoritas tetapi juga untuk kelompok mayoritas. Mereka beranggapan bahwa masyarakat memiliki struktur moral dan kebudayaan yang padu dan koheren. Hal seperti ini jarang menjadi permasalahan.⁴⁵

Meskipun struktur moral dan kebudayaan masyarakat memiliki koherensi internal, struktur itu tidak sepenuhnya sama dan padu. Struktur tersebut berbeda-beda menurut kelas, agama, wilayah dan disusun dari bermacam-macam rangkaian pemikiran bahkan yang bertentangan serta terdiri dari nilai-nilai dan praktek-praktek yang dapat ditafsirkan dan dihubungkan dengan beberapa cara yang berbeda. Golongan assimilasionis mengabaikan semua ini dan menawarkan satu pandangan yang sangat sempit dan menyimpang tentang kebudayaan nasional atau menyamakan struktur kelompok minoritas dengan kelompok yang lebih dominan.⁴⁶

Dalam masyarakat multikultural, pengikut atau pemeluk agama memainkan peranan dominan bagi ajaran agama yang dipeluknya atau bahkan di antara mereka ada sekelompok orang yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyataan seperti ini akan mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami keberadaan suatu agama dengan umatnya. Ada dua kelompok masyarakat beragama dalam masyarakat multikultural, yaitu masyarakat beragama *educated people* dan masyarakat beragama *ordinary people*.⁴⁷

Kedua masyarakat beragama ini berbeda dalam memperlakukan agama yang mereka peluk. Bagi masyarakat beragama *educated people*, memahami ajaran agama harus mengikutsertakan analisis

rasional dan mengesampingkan pemahaman intuitif dan simbolik. Mereka mudah diajak bertoleransi terhadap agama dan pemeluk agama lain.⁴⁸

Sebaliknya, masyarakat beragama *ordinary people* memahami ajaran agama penuh dengan simbol-simbol dan tidak mempergunakan analisis rasional. Mereka mudah tersulut emosi dan sangat susah bertoleransi dengan agama dan pemeluk agama lain. Kelompok ini mudah digerakkan oleh sekelompok orang atau komunitas baik yang beraliansi pada politik maupun pada sosial budaya.

4. Toleransi Beragama dalam Masyarakat

Multikultural Dalam masyarakat multikultural yang identik dengan masyarakat serba majemuk baik dalam politik, budaya atau bahkan agama, manusia beragama cenderung mengalami konflik akibat adanya berbagi kepentingan yang dihadapinya. Kelompok bergama yang secara ekonomi kuat akan mampu mengalahkan kelompok agama yang lemah secara ekonomi.⁴⁹

Pada sisi lain kelompok yang dianggap lemah dalam bidang perekonomian merasa tersisih dan terpinggirkan akibat tidak bisa bersaing dengan kelompok bergama yang kuat dari sisi ekonomi. Kelompok ini dalam menjalankan ekonominya berupaya mengimbangi kelompok kuat, serta memasukkan nilai-nilai supranatural. Dengan begitu, mereka merasa kuat secara kualitas spiritual sekalipun dalam skala kuantitas ekonomi kecil.

Kenyataan seperti di atas adalah respon yang mendasar dari kelompok kecil. Respon ini bisa muncul dalam bentuk kelompok fundamentalis. Kelompok ini bereaksi untuk menjawab kelompok yang kuat dalam sistem perekonomian dengan menggulirkan berbagai konsep konservatif, ortodoks atau tradisional menuju konsep-konsep fundamentalis modern. Mereka masuk dalam area

masyarakat sipil, dunia permodalan dan universitas-universitas. Sekalipun kelompok fundamentalis modern seperti ini secara ekonomi lemah, namun ia memiliki berbagai strategi kuat dalam media informasi yang menginspirasi berbagai kecenderungan militansi keagamaannya. Mereka menguasai berbagai jaringan telekomunikasi canggih dan mampu menyebarkan gagasan ideologisnya untuk menghancurkan kekuatan jumlah besar. Mereka bekerja untuk agama dan kepentingan politik keagamaannya.

Dalam masyarakat multikultural, pengikut atau pemeluk agama memainkan peranan dominan bagi ajaran agama yang dipeluknya atau bahkan di antara mereka ada sekelompok orang yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyataan seperti ini akan mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami keberadaan suatu agama dengan umatnya. Dalam keragaman agama-agama, yang muncul dalam suatu masyarakat multikultural baik yang memiliki sistem pemerintahan republik atau monarki, perbedaan sering menjadi pemicu munculnya berbagai hambatan dalam kohesi sosial. Perbedaan agama tersebut telah meletakkan pemahaman keagamaan dalam kerangka dua kubu umat beragama: satu, kubu umat beragama tuan rumah; kedua, kubu umat beragama pendatang. Kubu umat beragama tuan rumah biasanya memiliki kuantitas umat yang mayoritas, sedangkan kubu umat beragama pendatang biasanya menduduki posisi minoritas. Kedua kubu ini saling bertubrukan dalam pergaulan sosial, bila di antara mereka menjadikan perbedaan agama sebagai hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai suatu bangsa atau masyarakat.⁵⁰

Munculnya kesadaran antar umat beragama yang diwujudkan dalam toleransi bisa menekan atau meminimalisasi bentrokan di antara mereka. Moto *agree in disagreement* menjadi modal sosial yang kuat dalam toleransi beragama. Toleransi beragama yang dikembangkan bukan hanya menghargai teologi dan iman masing-

masing agama dan umat beragama, tetapi juga memahami dan menghargai budaya dari umat beragama tersebut.⁵¹

Toleransi beragama mampu memberikan dukungan bagi terbentuknya masyarakat madani yang diinspirasi oleh nilai-nilai supranatural.

Ada dua tipe toleransi beragama: pertama, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman.⁵²

Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakekat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman. Praktik toleransi di sebuah negara sering mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemaknaan distingtif yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”.⁵³

Toleransi beragama yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan melahirkan sikap inklusif umat beragama. Sikap ini menganggap agama sendiri benar tetapi masih memberikan ruang untuk menyatakan kebenaran agama lain yang diyakini benar oleh umatnya. Sikap inklusif umat beragama akan mampu meruntuhkan sikap ekstremis dan eksklusif umat beragama, yang biasanya melahirkan pemahaman fanatik buta dan radikalisme bahkan terorisme yang abadi terhadap umat berbeda agama.

Toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain, baik yang berbeda maupun yang sama. Toleransi ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau pengaruh serta terhindar dari hipokrisis.⁵⁴

Toleransi mengandung maksud untuk memungkinkan terbentuknya sistem yang menjamin keamanan pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat dalam masyarakat. Ini direalisasikan dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain dan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya hanya karena berbeda keyakinan atau agama. Dalam kaitan dengan agama, toleransi mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilihnya serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.

C. *Epoché* Teologis Sebagai Paradigma Penghulu Agama dalam Membangun Toleransi Melalui Layanan Umat

Epoché pada mulanya digunakan oleh aliran Pyrrhonisme, yakni aliran filsafat Yunani sekitar abad 272 SM, untuk mengungkapkan keraguan dalam ilmu pengetahuan, sehingga pendiri aliran filsafat tersebut, Pyrrhon, dianggap sebagai pendiri skeptisisme kuno Yunani.⁵⁵

Pyrrhon juga dikenal sebagai pria bijak yang selalu berusaha menghindari perselisihan dalam ilmu pengetahuan tertentu dengan cara menanggukkan penilaian (praktik *epoché*) untuk diteliti terlebih dahulu. Pyrrhonisme sangat memengaruhi pemikiran para filsuf Eropa abad ke-17, terbukti dengan adanya istilah ini dalam tulisan-tulisan Kant pada tahun 1765, yang kemudian dipopulerkan filsuf Jerman Edmund Husserl dalam metode penelitian atas fenomena keagamaan sebagai respons terhadap penilaian-penilaian subjektif umat sekaligus kritik sistematis terhadap modernisme.

Epoché digagas pertama kali dalam kajian fenomenologi agama oleh Husserl pada abad ke-19, di antara karyanya adalah “Phenomenology and the Foundations of the Sciences”, “Logische Untersuchungen (Logical Investigations) (1901, 1913) dan “Meditations Cartésiennes (Cartesian Meditations)” (1931). Menurut Husserl, fenomenologi merupakan sebuah studi terhadap struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran tersebut mengacu kepada objek-objek di luar dirinya. Namun, semua itu tetap membutuhkan refleksi dari peneliti mengenai fenomena tersebut dengan mengesampingkan segalanya. Husserl menyebut tipe refleksi ini dengan “reduksi fenomenologi”, ia mencoba menghapus konsep dan konstruksi pandangan seseorang dalam penelitiannya.⁵⁶

Epoché menjadi ciri khas dalam fenomenologi Husserl, terutama dalam kecermatannya memperlihatkan dua hal penting. Pertama, kecermatan dalam menunjukkan akar permasalahan mendasar yang ada pada zaman modern, yaitu kesalahpahaman dalam memahami sifat dasar dunia dan sifat dasar manusia. Kedua, kecermatan dalam menunjukkan jalan keluar dari permasalahan modern tersebut, yaitu melalui sikap fenomenologis, khususnya *epoché*. Dalam karyanya, “Logische Untersuchungen” (Penyelidikan-penyelidikan Logika), dan “Philosophie als Strenge Wissenschaft”, (Filsafat sebagai Ilmu yang Kuat), Husserl memperlihatkan bahwa filsafat modern terjebak ke dalam masalah perbedaan kategori yang salah antara subjek dan objek. Menurutnya, seluruh gerak pemikiran modern sejak Descartes, Hegel, dan John Stuart Mill hanya merupakan gerak psikologis yang bersifat subjektif terhadap seluruh realitas, kemudian mendudukkan manusia sebagai pusat seluruh pengetahuan. Pandangan Husserl ini menjadi dasar baginya untuk menyebut filsafat modern sebagai psikologisme. Sedangkan psikologisme menjadikan manusia yang sadar itu sebagai awal dari segala sesuatu, dan kemudian seluruh realitas itu akhirnya

akan kembali kepada kesadaran manusia sendiri. Inilah semangat optimisme modern yang pada awalnya bertujuan menegakkan kedudukan manusia sebagai manusia seutuhnya, namun terjebak ke dalam pemutlakkan atas manusia dan rasionya.⁵⁷

Epoché memiliki sifat netral dalam penelitian keagamaan. Ia merupakan sikap yang coba menghindar dari penilaian yang diprakonsepsikan sebelumnya oleh seorang pemeluk agama yang meneliti fenomena keagamaan. Jadi, melalui *epoché* seorang fenomenolog dituntut untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara empiris suatu fenomena keagamaan, tanpa sudut pandang subjektif dirinya sebagai pemeluk agama. *Epoché* berada pada wilayah filsafat sekaligus teologi, namun adalah fakta bahwa manusia religius tepat saja dapat memengaruhi tindakantindakan dan tingkah-lakunya, sehingga ketika ungkapan keagamaan tersebut muncul darinya maka pengaruh tersebut akan terbawa ke dalam wilayah faktual. Artinya, seorang fenomenolog tetap perlu mempertanyakan hakikat sebenarnya sebuah fenomena keagamaan melalui prinsip *epoché* tanpa harus terlibat untuk merumuskan baik-buruknya religiositas atau moralitas suatu kasus. *Epoché* sangatlah fundamental dalam studi agama-agama. Ia merupakan kunci untuk menghilangkan sikap tidak simpatik, marah dan benci atau pendekatan yang penuh kepentingan (*intertested approaches*), dan fenomenologi telah membuka pintu penetrasi dari pengalaman keberagaman baik dalam skala yang lebih luas atau yang lebih baik.⁵⁸

Jika semua umat beragama yang hidup dalam masyarakat multikultural mampu membuka sikap *epoché*, mereka bisa merasakan penderitaan, suka duka atau bahkan kesenangan dengan umat berbeda agama. Sikap *epoché* dalam fenomenologi ini adalah sikap menunda, menahan diri bila seorang beragama bertemu dengan ajaran agama yang berbeda dengan ajaran agama yang dipeluknya. Keberagaman dengan berpijak pada sikap *epoché*

akan bisa menghargai umat berbeda agama dengan kesadaran sendiri dan bukan atas keterpaksaan atau ancaman.

D. Kesimpulan

Kompetensi Penyuluh Agama dalam melayani umat menuju kehidupan beragama yang toleran sudah memiliki persepsi dan pemahaman yang benar pada ajaran agama dan norma (*world view*) dalam membangun wawasan tentang pluralitas dan multi-etnis (multikultur). Sikap Penyuluh Agama dalam melayani umat yang proaktif ketika mengelola konflik dan mendayagunakan kearifan lokal untuk meminimalisir perbedaan menjadi kompetensi sosial yang harus selalu diasah. Masyarakat multikultural terpolo oleh keragaman budaya termasuk keragaman agama. Di dalam perjalanannya, agama-agama yang muncul dalam masyarakat multikultural kemudian dipahami oleh umatnya. Di antara mereka, ada yang memahaminya secara rasional *an sich* dan ada pula yang memahaminya secara irasional atau mistis. Dampak heterogenitas agama ini bisa memunculkan konflik di antara umat berbeda agama. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan dan kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Untuk menciptakan sikap toleransi beragama yang proporsional dalam masyarakat multikultural perlu menumbuhkan sikap *epoché* dalam melayani umat. Sikap *epoché* ini mutlak diperlukan oleh Penyuluh Agama tanpa kompromi agar mereka bisa mengampanyekan dan mengukuhkan toleransi beragama dengan baik. Jika sikap *epoché* ini tidak dimiliki, maka pelayanan umat untuk meneguhkan toleransi terhadap agama orang lain hanya akan sebatas basa-basi.

Daftar Pustaka

- Albert, Bertrhude, T Grady Roberts, and Amy Harder. "Career Development Influences of Employees Working in Haiti's Agricultural Extension and Advisory Services." *Journal of International Agricultural and Extension Education* 24, no. 2 (2017): 107–21.
- Amin, S. M. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Prenada Media, 2016.
- Astutik, Anita Puji. "Dasar Filosofis Dan Konteks Historis Wawasan Kebangsaan Dalam Kurikulum Al Islam Dan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Bakti, Wella Pratiwi, Ilham Khoerul Imam, and Erja Satria Aji. "KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK SOSIODRAMA UNTUK MENINGKATKAN SIKAP TOLERANSI ANTAR AGAMA DI ERA INDUSTRI 4.0." In *SEMBIKA: Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 2019.
- Berger-Schmitt, Regina. "Considering Social Cohesion in Quality of Life Assessments: Concept and Measurement." *Social Indicators Research* 58, no. 1 (2002): 403–28. <https://doi.org/10.1023/A:1015752320935>.
- Budiawan, Afiq, Maratul Matsna, and Rian Vebrianto. "Melejitkan Social Intelligent Perpsektif Al-Qur'an Sebagai Ikhtiar Menangkal Radikalisme." *Journal of Hupo_Linea* 1, no. 1 (2020): 28–36.

- Casram, Casram. "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 187–98.
- Cooper, Graham, Sharon Tindall-Ford, Paul Chandler, and John Sweller. "Learning by Imagining." *Journal of Experimental Psychology: Applied* 7, no. 1 (2001): 68.
- Culp, K, Renee K McKee, and Patrick Nestor. "Identifying Volunteer Core Competencies: Regional Differences." *Journal of Extension* 45, no. 6 (2007): 1–9.
- Dalimunthe, Farhan Abdillah. "Studi Pemikiran Buya Hamka Dalam Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia." Universitas International Semen Indonesia, 2019.
- Darwis, Mohammad. "Nahdlatul Ulama Dan Perannya Dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Pada Masyarakat Plural." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2021): 141–63.
- Deliani, Nurfarida. "Konsepsi (Kesalahpahaman) Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan." *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2018, 111–26.
- Faridah, Siti. "Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 199–214.
- Fitriani, Fitriani, Alexander Phuk Tjilen, and Vinsenco R Serano. "Pengaruh Budaya, Perilaku Dan Status Sosial Etnis Tionghoa Terhadap Kerukunan Masyarakat." *Musamus Journal of Public Administration* 1, no. 1 (2018): 1–14.
- Hasan, Engking Soewarman, and Sri Nurhayati. "Pendidikan Luar Sekolah Dan Pembangunan Manusia Indonesia." *EMPOWERMENT: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah* 1, no. 1 (2012).

- Hasse, J. "Dinamika Hubungan Islam Dan Agama Lokal Di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang Di Sulawesi Selatan." *Wawasan J. Ilm. Agama Dan Sos. Budaya* 1, no. 2 (2016): 179–86.
- Hasmy. *Dustur Dakwah Menurut Al Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Hidayatulloh, M Taufik. "Dimensi Religiusitas Masyarakat: Sebuah Bukti Dedikasi Penyuluh Agama Di Kota Tangerang Selatan." *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 11, no. 1 (2020): 71–86.
- Kahmad, Dadang. "Wawasan Agama Madani Sebuah Keniscayaan Sosiologis Dalam Bangsa Majemuk." *Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Jawa Barat*, 2020.
- Kamaluddin, Kamaluddin. "Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam: Konsep Dasar Dan Arah Pengembangan." *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2014): 41–52.
- Kinloch, Graham C. *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- — —. *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Klausmeier, Herbert J, and William Goodwin. "Learning and Human Abilities: Educational Psychology," 1966.
- Koliluddin, Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama*. Semarang: RaSAIL, 2009.
- Kurniawan, Nur Fachri, and I R Rustan. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI

- MANDAR." MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi 5, no. 1 (2021).
- Kurniawan, Ridwan, and Amri Jahi. "Kompetensi Penyuluh Pertanian Di Tujuh Kecamatan Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat." *Jurnal Penyuluhan* 1, no. 1 (2005).
- Kusnawan, Aep. "Urgensi Penyuluhan Agama Islam." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 5, no. 17 (2011): 271–90.
- Kustini, and Koeswinarno. "PENYULUH AGAMA : MENUJU KINERJA PROFESIONAL The Religious Councelor : Towards Professional Performance." *Analisa Journal off Social Science Dan Religion* 22, no. 02 (2015): 173–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18784/analisa.v22i2.103>.
- Marius, Jelamu Ardu, Sumardjo Sumardjo, Margono Slamet, and Pang S Asngari. "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Penyuluh Terhadap Kompetensi Penyuluh Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Penyuluhan* 3, no. 2 (2007).
- Mashudi, Mashudi. "PENDIDIKAN KEBERAGAMAN SEBAGAI BASIS KEARIFAN LOKAL." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2014).
- Moran, Dormort. *Introduction To Phenomenology*. New York: The Westminster Press, 2012.
- Mubarak, A. *Psikologi Qur'ani Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Mulyana, Asep, and Wa Ode Zusnita Muizu. "Pengembangan Koperasi Kota Bandung Melalui Pemetaan Pelaku Usaha Koperasi Dan Usaha Unggulannya." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 1, no. 3 (2014): 385–97.

- Nadzir, Mohammad. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 37–56.
- Narso, Narso, Amiruddin Saleh, Pang S Asngari, and Pudji Muljono. "Strategi Pengembangan Peran Penyuluh Pertanian Lapang Di Provinsi Banten." *Jurnal Penyuluhan* 8, no. 2 (2012).
- Nirwana, Andi, and Muhammad Rais. "Toleransi Antar Umat Beragama Islam Dan Kristen Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa." *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama* 6, no. 02 (2019): 185–218.
- Nurhayati, Ifa, and Lina Agustina. "Masyarakat Multikultural: Konsep, Ciri Dan Faktor Pembentuknya." *Akademika* 14, no. 01 (2020).
- Nurjamilah, Cucu. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi Saw." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 93–119.
- Nurkholipah, Nurkholipah. "Pengaruh Penyuluhan Agama Islam Terhadap Kesadaran Beragama Kepada Masyarakat." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 3 (2017): 287–310.
- Omar, M. T. *Islam Dan Dakwah*. Jakarta: Zakia Islami Press, 2004.
- Parekh, Bikhu. *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity And Political Theory*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Peraturanpedia.id. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021." *Peraturanpedia.id*, 2021. <https://peraturanpedia.id/permenpan-rb-nomor-9-tahun-2021/>.

- Prasisko, Yongky Gigih. "Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural." *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 3, no. 1 (2019): 1–12.
- Proctor, James D. *Science, Religion and the Human Experience*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Proctor, Sherrie L, and Margaret R Rogers. "Making the Invisible Visible: Understanding Social Processes Within Multicultural Internship Supervision." In *School Psychology Forum*, Vol. 7, 2013.
- Purbasari, Imaniar. "Dinamika Pembangunan Masyarakat Kudus Berkonteks Sejarah Industri Dan Budaya Lokal." *Khazanah Pendidikan* 11, no. 1 (2018).
- Putri, Yohilda Elva, Dewangga Nikmatullah, and Begem Viantimala. "KOMPETENSI PPL DAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI DALAM MENUNJANG BP3K BERPRESTASI DI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR." *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis* 7, no. 1 (2019): 106–12.
- Rahmat, Hayatul Khairul, Joshua Banjarhanor, Nurbaiti Ma'rufah, and I Dewa Ketut Kerta Widana. "Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): 91–107.
- Riza, Muhammad. "Relasi Antar Iman Di Negeri Syari'at Islam (Studi Peran Dan Fungsi FKUB Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Aceh Tengah)." *Jurnal As-Salam* 3, no. 1 (2019): 48–60.
- Rohman, Dudung Abdul. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PENYULUH AGAMA NON PNS DALAM MENYATUKAN MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN KINERJANYA." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*

- 12, no. 33 (2018): 138–51.
- Ruslan, Idrus. *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2020.
- Rusman, Abdul Aziz, and Ahmad Riadi. "Sinkronisasi Pendidikan Karakter Dan Toleransi Masyarakat Di Desa Marancar Julu, Kec. Marancar, Kab. Tapanuli Selatan." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 722–29.
- Rutherford, Justine. "Key Competencies in the New Zealand Curriculum: A Snapshot of Consultation, December 2004." Unpublished Report. Wellington: Ministry of Education, 2004.
- Saihu, Abd Aziz, Fatkhul Mubin, and Ahmad Zain Sarnoto. "Design of Islamic Education Based on Local Wisdom (An Analysis of Social Learning Theories in Forming Character through Ngejot Tradition in Bali)." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 06 SE-Articles (April 26, 2020): 1278–93. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/11802>.
- Saihu, Made. "PEDIDIKAN MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ISLAM WASATHIYAH MENURUT NURCHOLISH MADJID." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2021): 16–34.
- Saihu, Made, and Taufik Taufik. "MULTICULTURAL EDUCATION APPROACH TO PESANTREN IN INDONESIA (ANALYSIS STUDY OF JAMESA. BANK MULTICULTURAL EDUCATION APPROACH)." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 3, no. 02 (2020): 319–42.
- Sakharina, Iin Karita, M A SH, Pustaka Pena Press, and Anggota IKAPI Sul-Sel. "Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan

- Hak Atas Kecukupan Pangan Yang Layak Di Indonesia." Makassar: Pustaka Pena, 2016.
- Salma, Salma, S H Nenden Herawati, Nenden Herawati MH, and M H SH. "MANAJEMEN MAJELIS TAKLIM SEBAGAI WADAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU PENDIDIKAN KARAKTER (STUDI TERHADAP MODEL PENGELOLAAN MAJELIS TAKLIM DI SULAWESI UTARA)." IAIN MANADO, 2018.
- Samsinah, Samsinah. "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Muallaf Di Patambia Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2020.
- Schuon, F. *The Transcendent Unity of Religions. A Quest Book.* Theosophical Publishing House, 1984. <https://books.google.co.id/books?id=HScR1XS6q7MC>.
- Setyorini, Wahyu. "Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 8, no. 3 (2020): 1078–93.
- Sodik, Fajri. "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *Tsamratul Fikri* 14, no. 1 (2020): 1–14.
- Sukmawati, Nur Endang. "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagamaan Anak Di Desa Lassa-Lassa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Sulaeman, Endang Sutisna, Ravik Karsid, Bhisma Murti, Drajat Tri Kartono, and Rifai Hartanto. "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kemampuan Mengidentifikasi Masalah Kesehatan: Studi Pada Program Desa Siaga." *Jurnal Kedokteran YARSI* 20, no. 3 (2012): 128–42.

- Sumbulah, Umi. "Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama Di Kota Malang." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 22, no. 1 (2015): 1–13.
- Sumitro, Sumitro. "Pelestarian Nilai Budaya Kaco'i Angi Pada Masyarakat Donggo." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 26–33.
- Syafii, Ahmad. "Perluasan Dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)." *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2018): 153–71.
- Syuhudi, Muh Irfan. "Penyuluh Agama Dan Pengelolaan Kerukunan Di Manado." *Mimikri* 3, no. 1 (2017): 28–41.
- Tadaro, Micheae P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Usman, Sunyoto, Zuly Qodir, and J Hasse. "Radikalisme Agama Di Indonesia." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wach, Joachim. *The Comparative Study of Religion*. New York: Colombia University Press, 1958.
- Wahyuni, Dwi. "Agama Sebagai Media Dan Media Sebagai Agama." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 18, no. 2 (2017).
- Yanuar, Muhamad Fajri. "Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Petani Perempuan (Sauyunan Perempuan Petani Binangkit Kabupaten Cianjur)." *Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ...*, n.d.

ENDNOTES

1. Omar, M. T. *Islam dan Dakwah*. (Zakia Islami Press, 2004).
2. Deliani, N. Konsepsi (Kesalahpahaman) Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan. *Al Irsyad J. Bimbing. Konseling Islam* 111–126 (2018).
3. Mubarak, A. *Psikologi Qur'ani Suatu Pengantar*. (Bumi Aksara, 2021).
4. Peraturanpedia.id. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021. *Peraturanpedia.id* (2021).
5. Ahmad, M. *et al.* Academic Culture: Refleksi, Asesmen dan Agenda Masa Depan. (2020).
6. Syuhudi, M. I. Penyuluh Agama dan Pengelolaan Kerukunan di Manado. *Mimikri* 3, 28–41 (2017).
7. Kustini & Koeswinarno. PENYULUH AGAMA : MENUJU KINERJA PROFESIONAL The Religious Councelor : Towards Professional Performance. *Anal. J. off Soc. Sci. dan Relig.* 22, 173–186 (2015).
8. Mashudi, M. PENDIDIKAN KEBERAGAMAN SEBAGAI BASIS KEARIFAN LOKAL. *Tarbawi J. Pendidik. Islam* 11, (2014).
9. Saihu, S. Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer. *J. Indo-Islamika* 9, 67–90 (2020).
10. Usman, S., Qodir, Z. & Hasse, J. Radikalisme agama di Indonesia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2014).
11. Aminah, S. *Kuasa negara pada ranah politik lokal*. (Prenada Media, 2016).
12. Wach, J. *The Comparative Study of Religion*. (Colombia University Press, 1958).
13. Budiawanti, E. *Islam Sasak: Wetu Twelu Versus Wetu Lima*. (LKis, 2000).
14. Schuon, F. *The Transcendent Unity of Religions*. (Theosophical Publishing House, 1984).
15. Kinloch, G. C. *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. (Pustaka

- Setia, 2005).
16. Sakharina, I. K., SH, M. A., Press, P. P. & Sul-Sel, A. I. Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan Yang Layak Di Indonesia. *Makassar Pustaka Pena* (2016).
 17. Tadaro, M. P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Erlangga, 2000).
 18. Syafii, A. Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat J. Manaj. dan Pendidik. Islam* **4**, 153–171 (2018).
 19. Hasan, E. S. & Nurhayati, S. Pendidikan luar sekolah dan pembangunan manusia Indonesia. *Empower. J. Ilm. Progr. Stud. Pendidik. Luar Sekol.* **1**, (2012).
 20. Kamaluddin, K. Dakwah dan pengembangan masyarakat Islam: konsep dasar dan arah pengembangan. *HIKMAH J. Ilmu Dakwah dan Komun. Islam* **8**, 41–52 (2014).
 21. Shihab, M. Q. *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*. (Lentera Hati, 2005).
 22. Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Lentera Hati, 2002).
 23. Hasymy. *Dustur Dakwah Menurut Al Qur'an*. (Bulan Bintang, 1994).
 24. Amin, S. M. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. (Amzah, 2008).
 25. Mayasarokh, M. & Rohman, A. IMPLEMENTASIPENDIDIKANKARAKTER PADA ANAK USIA DINI DI KELOMPOK BERMAIN RABBANI. *J. Pelita PAUD* **3**, 167–185 (2019).
 26. Nurkholipah, N. Pengaruh Penyuluhan Agama Islam Terhadap Kesadaran Beragama Kepada Masyarakat. *Irsyad J. Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* **5**, 287–310 (2017).
 27. Kahmad, D. Wawasan Agama Madani Sebuah Keniscayaan Sosiologis Dalam Bangsa Majemuk. (2020).

28. Astutik, A. P. Dasar filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. (2020).
29. Culp, K., McKee, R. K. & Nestor, P. Identifying volunteer core competencies: Regional differences. *J. Ext.* **45**, 1–9 (2007).
30. Klausmeier, H. J. & Goodwin, W. Learning and human abilities: Educational psychology. (1966).
31. Albert, B., Roberts, T. G. & Harder, A. Career development influences of employees working in Haiti's agricultural extension and advisory services. *J. Int. Agric. Ext. Educ.* **24**, 107–121 (2017).
32. Cooper, G., Tindall-Ford, S., Chandler, P. & Sweller, J. Learning by imagining. *J. Exp. Psychol. Appl.* **7**, 68 (2001).
33. Marius, J. A., Sumardjo, S., Slamet, M. & Asngari, P. S. Pengaruh faktor internal dan eksternal penyuluh terhadap kompetensi penyuluh di Nusa Tenggara Timur. *J. Penyul.* **3**, (2007).
34. Namdar, R., Rad, G. P. & Karamidehkordi, E. Professional competencies needed by agricultural and extension program evaluation staff and managers of Iranian Ministry of Agriculture. *J. Int. Ext. Educ.* **17**, 17–31 (2010).
35. Rutherford, J. Key competencies in the New Zealand curriculum: A snapshot of consultation, December 2004. *Unpubl. report. Wellingt. Minist. Educ.* (2004).
36. Husni, R. & Norman, E. DELIBERALISASI PENDIDIKAN KARAKTER "RESPECT AND RESPONSIBILITY" THOMAS LICKONA. *Tawazun J. Pendidik. Islam* **8**, 257–274 (2018).
37. Kusnawan, A. Urgensi Penyuluhan Agama Islam. *Ilmu Dakwah Acad. J. Homilet. Stud.* **5**, 271–290 (2011).
38. Samsinah, S. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Muallaf di Patambia Kabupaten Pinrang. (2020).
39. Salma, S., Nenden Herawati, S. H., MH, N. H. & SH, M. H. MANAJEMEN MAJELIS TAKLIM SEBAGAI WADAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- MENUJU PENDIDIKAN KARAKTER (STUDI TERHADAP MODEL PENGELOLAAN MAJELIS TAKLIM DI SULAWESI UTARA). (2018).
40. Yanuar, M. F. Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Petani Perempuan (Sauyunan Perempuan Petani Binangkit Kabupaten Cianjur).
 41. Hidayatulloh, M. T. Dimensi religiusitas masyarakat: sebuah bukti dedikasi penyuluh agama di kota tangerang selatan. *Al Irsyad J. Bimbingan. Konseling Islam* **11**, 71–86 (2020).
 42. Narso, N., Saleh, A., Asngari, P. S. & Muljono, P. Strategi pengembangan peran penyuluh pertanian lapang di Provinsi Banten. *J. Penyul.* **8**, (2012).
 43. Saihu, M. *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama di Jembrana-Bali)*. (Deepublish, 2019).
 44. Casram, C. Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Wawasan J. Ilm. Agama Dan Sos. Budaya* **1**, 187–198 (2016).
 45. Faridah, S. Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya. *Lex Sci. Law Rev.* **2**, 199–214 (2018).
 46. Nurhayati, I. & Agustina, L. Masyarakat Multikultural: Konsep, Ciri Dan Faktor Pembentuknya. *Akademika* **14**, (2020).
 47. Darwis, M. Nahdlatul Ulama dan Perannya dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah pada Masyarakat Plural. *Tarbiyatuna J. Pendidik. Islam* **14**, 141–163 (2021).
 48. Fitriani, F., Tjilen, A. P. & Serano, V. R. Pengaruh Budaya, Perilaku Dan Status sosial Etnis Tionghoa Terhadap Kerukunan Masyarakat. *Musamus J. Public Adm.* **1**, 1–14 (2018).
 49. Prasisko, Y. G. Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. *Waskita J. Pendidik. Nilai dan Pembang. Karakter* **3**, 1–12 (2019).
 50. Bakti, W. P., Imam, I. K. & Aji, E. S. KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK SOSIODRAMA UNTUK MENINGKATKAN SIKAP TOLERANSI ANTAR AGAMA DI ERA INDUSTRI 4.0. in *SEMBIKA: Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (2019).

51. Setyorini, W. Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar). *Kaji. Moral Dan Kewarganegaraan* **8**, 1078–1093 (2020).
52. Hasse, J. Dinamika hubungan Islam dan agama lokal di Indonesia: pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. *Wawasan J. Ilm. Agama dan Sos. Budaya* **1**, 179–186 (2016).
53. Parekh, B. *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory*. (Palgrave Macmillan, 2005).
54. Sodik, F. Pendidikan Toleransi dan Relevansinya dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia. *Tsamratul Fikri* **14**, 1–14 (2020).
55. Nirwana, A. & Rais, M. Toleransi Antar Umat Beragama Islam dan Kristen Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *J. Al Adyaan; J. Sos. dan Agama* **6**, 185–218 (2019).
56. Moran, D. *Introduction To Phenomenology*. (The Westminster Press, 2012).
57. Proctor, S. L. & Rogers, M. R. Making the Invisible Visible: Understanding Social Processes Within Multicultural Internship Supervision. in *School Psychology Forum* vol. 7 (2013).
58. Spencer, L. M. & Spencer, S. M. *Competence at Work: Model for Superior Competence Performance*. (John Wiley & Sons, Inc, 1993).